

Peran Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Instansi Pemerintah

Penulis:

Putri Aulia Thamrin¹
Hartinah²
Lilik Serli Fandani³
Nurul Maulidiyah⁴
Wulan Ramadhani Usman⁵

Afiliasi:

Institut Agama Islam Negeri
Sorong

Korespondensi:

Putritmrn19@gmail.com

Riwayat Naskah

Diterima 12,08, 2025
Disetujui 17,10, 2025
Diterbitkan 30,10, 2025

Hak Cipta:

©2023. Penulis. Lisensi: Al-Mumtaz. This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Abstrak

Persoalan keterbukaan dan pertanggungjawaban pada institusi pemerintahan tetap menjadi fokus krusial dalam merealisasikan pemerintahan yang baik. Aksesibilitas informasi publik dan responsibilitas aparatur birokrasi kerap belum terimplementasi secara maksimal sehingga memunculkan skeptisisme masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji fungsi manajemen strategik dalam mengoptimalkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pada institusi pemerintahan. Metode penelitian menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik kajian literatur yang mengeksplorasi berbagai referensi akademik relevan, mencakup jurnal, laporan, dan buku ilmiah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi manajemen strategik melalui fase perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat mengonsolidasikan mekanisme kontrol, mengoptimalkan efektivitas regulasi, dan mengekspansi keterlibatan publik dalam mekanisme formulasi keputusan. Internalisasi prinsip keterbukaan ke dalam setiap fase strategi turut meningkatkan performansi organisasi publik dan mendorong pertanggungjawaban yang berkesinambungan. Manajemen strategik memegang peranan vital dalam membangun pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Transparansi, Akuntabilitas, Instansi Pemerintah

Abstract

The issue of transparency and accountability in government institutions remains a crucial focus in realizing good governance. Accessibility to public information and the responsibility of the bureaucracy are often not fully implemented, giving rise to public skepticism towards government institutions. This study aims to examine the function of strategic management in optimizing transparency and accountability in government institutions. The research method applies a qualitative approach with a literature review technique that explores various relevant academic references, including journals, reports, and scientific books. The research findings indicate that the implementation of strategic management through the planning, implementation, and evaluation phases can consolidate control mechanisms, optimize regulatory effectiveness, and expand public involvement in the decision-making mechanism. The internalization of the principle of openness into each phase of the strategy also improves the performance of public organizations and encourages continuous accountability. Strategic management plays a vital role in building an adaptive, open government that is oriented toward quality public services.

Keyword: Strategic Management, Transparency, Accountability, Government Agency

PENDAHULUAN

Manajemen strategis mengacu pada pengelolaan seluruh proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategis merupakan suatu proses terpadu dalam perumusan kebijakan, yang terdiri dari tiga proses utama; yaitu perumusan strategi (pengembangan), pelaksanaan (implementasi) dan penilaian/evaluasi. Secara teori, *Strategic Care* dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu; menetapkan misi, tujuan dan sasaran; tujuan, struktur, sistem kerja, tim, budaya dan kebijakan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan proses operasional adalah proses perumusan dan implementasi strategi. Stahl dan Grigsby menggambarkan setiap tahapan yaitu proses formulasi yang memerlukan beberapa langkah untuk menilai potensi senyawa agar efektif. Melakukan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman). Langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana strategis yang harus menguraikan tujuan, sasaran, sasaran dan sasaran. Untuk mengembangkan strategi yang efektif, organisasi harus belajar dari pengalaman. Strategi yang dipilih kemudian dapat diubah sepenuhnya. Dengan demikian, implementasi merupakan tahapan yang penting, karena pada tahap ini seorang pemimpin bertugas melaksanakan strategi implementasi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem, sistem dan budaya operasional untuk meningkatkan motivasi pemimpin. Stahl dan Grigsby menyimpulkan bahwa motivasi pemimpin organisasi dan karyawan merupakan pendorong utama kinerja organisasi (Stahl & Grigsby, 2010). Salah satu cara untuk tetap melakukan perubahan pada diri sendiri adalah melalui pelatihan.

Instansi pemerintah mempunyai prinsip transparansi yang menjamin akses atau transparansi kepada setiap orang dalam menerima informasi yang diterimanya dari pemerintah, yaitu mendapat informasi mengenai kebijakan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai sehingga transparansi memenuhi tujuan pemerintah. Peningkatan transparansi kemudian akan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Untungnya, menurut Kristianten, pendekatan terbuka akan memberikan tujuan terbaik. Transparansi akan meningkatkan peran perumus kebijakan, sehingga meningkatkan kontrol publik terhadap pihak yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan kebijakan. Transparansi mempunyai peran penting dalam akuntabilitas publik karena pengetahuan tentang kebijakan pemerintah setidaknya memudahkan masyarakat untuk memahami tindakan mereka, memahami rasionalitas tindakan mereka, dan membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi, partisipasi masyarakat tidak akan ada (Rasyid & Nugroho, 2020).

Di sini, transparansi menjadi hal yang tabu dalam perlakuan terhadap akuntabilitas publik karena dengan transparansi, publik setidaknya memiliki warga negara yang sama untuk memahami prinsip, dasar pemikiran pedoman dan memahaminya dengan sistem nilai yang berlaku saat ini. Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek penting: (1) kepatuhan terhadap visibilitas informasi (*accessibility of information*); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab antar lembaga yang menjadi

bagian dari proses yang menyeimbangkan transparansi; dan (3) sistem dan kemampuan di balik produksi dan penggunaan informasi secara sistematis (Irawati et al., 2024). Ketiga aspek penting tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena sebuah sistem informasi saja tidak cukup bila tidak ada kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing organisasi yang terlibat dalam berbagai proses yang sedang dijalankan, semua itu harus dijalankan berdasarkan skema sebelumnya (Ohemeng & Ayee, 2023).

Manajemen strategis berperan penting dalam meningkatkan transparansi pada institusi pemerintah (Dwiyanto, 2024). Kebijakan yang terstruktur tidak hanya memberikan panduan bagi lembaga pemerintah, namun juga memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki akses dan memahami tindakan dan keputusan lembaga pemerintah (Purwanto & Prabowo, 2023). Dengan merumuskan visi, misi dan tujuan yang jelas serta mengkomunikasikannya secara efektif, praktik manajemen dapat membangun kepercayaan dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Selain itu, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ke dalam perencanaan strategis, organisasi dapat memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh operasi mereka (Purwanto & Prabowo, 2023). Penelitian (Fox, 2022) menunjukkan bahwa transparansi dimulai dari prosedur yang jelas mengenai akses informasi.

Di era reformasi saat ini, terdapat fokus yang kuat terhadap akuntabilitas publik karena pemerintah dipandang kurang transparan, kurang adil, kurang cepat dan tidak akurat dalam mengelola keuangan yang bertanggung jawab (Piotrowski, 2021). Tanggung jawab para pejabat, baik pemerintah pusat maupun daerah, sangatlah penting dan merupakan sebuah keniscayaan, karena dalam suasana demokrasi saat ini, peran rakyat sangatlah sentral, karena peran rakyat antara lain mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan ini dapat terlaksana dengan baik apabila tugas pemerintah dilaksanakan secara transparan. Hingga saat ini, akuntabilitas publik belum dianggap sebagai suatu keharusan bagi institusi pemerintah (Meijer, 2020). Tanggung jawab publik hanya berlaku bagi perusahaan swasta yang menghasilkan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jika produknya mahal atau jelek maka masyarakat tidak akan membelinya, sehingga perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan nilai dan kualitas produknya agar masyarakat merasa lebih baik. Lembaga pemerintah tidak bisa terus menerus melakukan hal tersebut, karena warga negara sebagai wajib pajak harus membayar agar pelayanan pemerintah dapat berfungsi dengan baik. Kinerja buruk dan kegagalan sistem tidak dapat diatasi secara langsung dan efektif (Piotrowski, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peran kekuasaan pemerintah di tingkat daerah masih cukup timpang. Tata pemerintahan yang baik dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Harus ada akuntabilitas dan transparansi di pihak pemerintah dan negara. Pelayanan dan infrastruktur pemerintah penyediaan sumber daya kepada warga negara sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan efektif (Cucciniello et al., 2021). Akuntabilitas dan transparansi publik mengacu pada pejabat pemerintah yang memberikan informasi tentang urusan publik (Cucciniello et al., 2021).

Di zaman dimana informasi berlimpah dan masyarakat penuh kasih sayang, penting bagi pejabat pemerintah untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam

pekerjaan mereka. Korupsi, ketidakmampuan pemerintah dan tindakan orang-orang yang mencurigai institusi pemerintah menimbulkan banyak kerugian untuk referensi umum, pada langkah-langkah yang dibuat. Manajemen strategis adalah rencana bisnis lengkap yang memberikan solusi tepat terhadap suatu masalah bisnis. Manajemen strategis merupakan suatu kerja holistik yang memberikan solusi tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kajian ini mengkaji secara detail bagaimana penerapan manajemen strategis dapat memperkuat upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, produktif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Manajemen strategis yang meliputi langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sangat penting untuk mencapai administrasi yang efektif. Melalui perencanaan strategis, pemerintah dapat menetapkan visi, tujuan dan sasaran yang jelas serta merancang pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat dinilai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, manajemen strategis juga mendorong inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dahulu, beberapa instansi pemerintah menjalankan aktivitasnya secara transparan dan akuntabilitas, sehingga menyebabkan sulitnya mengakses informasi publik dan lemahnya sistem keamanan sehingga membuka kemungkinan terjadinya peretasan. Situasi seperti ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Dwiyanto, 2024). Dalam konteks ini, strategi tata kelola mempunyai peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan menerapkan strategi pengelolaan, pemerintah dapat melakukan perubahan radikal, yaitu dari pemerintahan yang sebelumnya tertutup menjadi pemerintahan yang lebih terbuka dan bersifat akuntabel. Penelitian ini mencakup langkah-langkah konkrit yang dapat mengimplementasikan tujuan dalam situasi ini. Terlihat bahwa perencanaan strategis dalam manajemen memegang peranan penting. Kebijakan tidak hanya berperan dalam menetapkan kebijakan dan tujuan, namun kebijakan juga harus berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis, instansi pemerintah dapat menghasilkan sistem yang lebih responsif dan terbuka terhadap kepentingan masyarakat. Dengan mengorganisasikan informasi dengan baik, pesan dapat dikomunikasikan dengan jelas dan dalam jangka waktu tertentu sehingga masyarakat dapat lebih percaya diri. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara rinci peran manajemen strategis dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka komprehensif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2021). Metode tinjauan pustaka dipilih sebagai strategi pengumpulan data melalui penelusuran, kompilasi, dan analisis berbagai sumber informasi ilmiah terpercaya. Sumber-sumber yang dirujuk mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi, serta publikasi relevan lainnya yang mendukung kajian tentang manajemen strategis. Tinjauan literatur ini didesain untuk membangun fondasi teoretis dan empiris yang kokoh terkait konsep-konsep fundamental dalam manajemen strategis, meliputi prinsip-prinsip dasar, model-model pengembangan, serta pendekatan-pendekatan yang lazim diaplikasikan dalam implementasinya. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi efektivitas implementasi manajemen strategis, khususnya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas organisasional. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi dimensi internal seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan orientasi strategis serta dimensi eksternal yang mencakup regulasi pemerintah, ekspektasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan.

Sejumlah kasus penerapan manajemen strategis pada institusi pemerintahan dianalisis untuk memberikan gambaran empiris. Ilustrasi-ilustrasi empiris ini bersumber dari studi kasus dan praktik-praktik nyata yang mendemonstrasikan bagaimana berbagai organisasi mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen strategis untuk mengoptimalkan komunikasi organisasional, menjamin transparansi, serta memperkuat akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, kajian-kajian ini tidak hanya menawarkan perspektif teoretis, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai operasionalisasi manajemen strategis di sektor publik. Melalui kerangka metodologis tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang interrelasi antara manajemen strategis, transparansi, dan akuntabilitas, serta signifikansinya dalam mewujudkan organisasi yang efektif, responsif, dan akuntabel.

HASIL

Manajemen strategis berasal dari militer dan awalnya dipraktikkan di sana. Pada awal tahun 1970-an, para pendidik dan peneliti kebijakan ekonomi bertemu untuk membahas perubahan kebijakan ekonomi dan tanggapan yang tepat terhadap perubahan tersebut (Sampurno, 2020). Gagasan ini dibawa ke sebuah konferensi di Universitas Pittsburgh pada tahun 1977, dan lahirlah apa yang kemudian dikenal sebagai manajemen strategis. Penerapan strategi pengelolaan yang efektif juga memerlukan dukungan teknologi informasi, seperti pengenalan sistem *e-Governmen t* (Sampurno, 2020). Teknologi ini memungkinkan akses informasi publik menjadi lebih mudah dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan

keterampilan merupakan kunci keberhasilan penerapan strategi pengelolaan berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua elemen kunci tata pemerintahan yang baik. Transparansi memastikan bahwa warga negara memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan, program, dan anggaran yang dikelola oleh pemerintah mereka (Cifuentes-Faura, 2023). Transparansi yang lebih besar akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan merupakan landasan utama untuk membangun sistem tata kelola yang lebih efektif (Mardiasmo, 2021). Menurut Sofiyani, praktik transparansi dan partisipasi di lingkungan desa dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan desa dan lembaga pemerintahan (Sofyani, 2021).

Sebaliknya akuntabilitas, memerlukan tanggung jawab yang jelas atas setiap tindakan dan keputusan pemerintah (Saputra & Kurniawan, 2020). Akuntabilitas berarti mengambil tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit pelaporan untuk mencapai target yang ditetapkan secara rutin. Akuntabilitas terstruktur dan Hal ini dicapai melalui pelaporan kinerja yang efisien, evaluasi berkelanjutan, dan pengendalian internal dan eksternal. audit eksternal. Dengan menerapkan strategi pengelolaan yang terukur, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program kerja memiliki tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang mudah dipahami. Akuntabilitas pada dasarnya adalah tentang penyediaan informasi kepada pemangku kepentingan dan pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan (Sampurno, 2020).

Transparansi mempunyai dampak terhadap kinerja pemerintah. Dalam hal meningkatkan kepercayaan masyarakat, masyarakat yang memahami apa yang dilakukan pemerintah akan lebih besar kemungkinannya untuk mendukung program yang dilaksanakan (Zeyn, 2020). Di sisi lain, transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan, protes, dan bahkan konflik. Efektivitas pengambilan keputusan juga erat kaitannya dengan transparansi informasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi kebijakan, pemerintah tidak hanya memperoleh dukungan politik namun juga wawasan baru yang dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan (Lindstedt & Naurin, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama pemerintahan yang bersih dan efektif. Transparansi pemerintah yang lebih besar merupakan bagian penting dalam membangun landasan yang kuat bagi demokrasi yang sehat. Transparansi memungkinkan pemerintah bertindak terbuka terhadap warganya, membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu contohnya adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengakses informasi publik (BPK RI, 2014). UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (BPK RI, 2008). Undang-undang ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan. Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat

PEMBAHASAN

Penerapan manajemen strategik yang baik berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Proses manajemen strategik yang terdiri atas tahap perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dapat membantu lembaga publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Melalui perencanaan strategis, instansi pemerintah dapat menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas serta merumuskan kebijakan yang berorientasi pada hasil. Tahap implementasi memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan rencana kerja, sedangkan tahap evaluasi berfungsi sebagai mekanisme umpan balik untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan. Dalam hal ini, penerapan manajemen strategik memungkinkan pemerintah untuk menilai kinerja program berdasarkan ukuran keberhasilan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa integrasi prinsip transparansi ke dalam siklus manajemen strategik berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Keterbukaan informasi mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Penggunaan *Balanced Scorecard* sebagai alat ukur kinerja membantu lembaga publik menilai keberhasilan program secara komprehensif dari empat perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Analisis SWOT dan PESTEL turut membantu instansi pemerintah mengenali kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penerapan manajemen strategik yang terstruktur tidak hanya memperbaiki efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun budaya organisasi yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kaplan & Norton, 1992) yang menegaskan bahwa *Balanced Scorecard* dapat digunakan untuk menyelaraskan strategi organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Hasil penelitian juga memperkuat konsep *New Public Management* yang diperkenalkan oleh (Hood, 2006), yang menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil dalam birokrasi publik melalui adaptasi praktik manajemen sektor swasta. (Sofyani, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang responsif. Konsepsi manajemen strategik menurut (Stahl & Grigsby, 2010) menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan strategi organisasi sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan

dan partisipasi aktif seluruh komponen organisasi. Dalam ranah pemerintahan, prinsip ini mengindikasikan perlunya kepemimpinan birokrasi yang memiliki orientasi strategis yang tegas serta kapasitas untuk mengarahkan aparatur negara dalam mencapai sasaran kolektif. Kajian ini turut memvalidasi gagasan (Pearce & Robinson, 2023) yang menitikberatkan signifikansi evaluasi kondisi internal maupun eksternal organisasi guna menjamin keselarasan strategi dengan dinamika transformasi yang terjadi. Hasil riset menunjukkan bahwa lembaga pemerintah yang secara rutin melaksanakan analisis SWOT dan PESTEL memiliki daya adaptasi lebih tinggi terhadap fluktuasi lingkungan politik, ekonomi, dan sosial (Andrews et al., 2022). Dengan demikian, studi ini mengonfirmasi bahwa implementasi manajemen strategik pada sektor publik bukan sekadar merupakan formalitas administratif, melainkan suatu proses adaptif yang berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Di samping memperkuat teori-teori eksisting, riset ini juga memberikan justifikasi empiris terhadap paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terutama dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas. Adopsi prinsip-prinsip manajemen strategik terbukti efektif dalam memperkuat sistem kontrol dan pelaporan kepada publik (Prasojo & Kurniawan, 2022), sehingga setiap formulasi kebijakan dapat dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sejalan dengan perspektif (Mappasiara, 2020) yang mengemukakan bahwa manajemen strategik menawarkan kerangka kerja adaptif bagi institusi publik dalam merespons perubahan lingkungan sekaligus menguatkan legitimasi di mata publik. Oleh karena itu, konstruksi teoritis manajemen strategik tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga pragmatis karena mampu memberikan solusi atas permasalahan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti degradasi integritas birokrasi, kelemahan sistem pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan.

Riset ini membawa konsekuensi terhadap transformasi sikap dan orientasi kerja birokrat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Melalui internalisasi prinsip-prinsip manajemen strategis, lembaga publik terdorong menerapkan mekanisme kerja yang lebih terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. Keterbukaan yang dihadirkan lewat aksesibilitas informasi publik, publikasi capaian kinerja, serta pemeriksaan oleh pihak independen membuka peluang bagi warga untuk terlibat aktif dalam fungsi kontrol sosial (Wirtz & Birkmeyer, 2019). Konsekuensinya, keterlibatan masyarakat dalam ruang publik meningkat dan kredibilitas institusi negara mengalami penguatan. Entitas pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan cenderung menunjukkan performa superior karena setiap regulasi yang dirumuskan dapat dikaji secara objektif (Fox, 2022). Di samping itu, adopsi sistem informasi digital seperti layanan pemerintahan elektronik memperkuat efisiensi administratif dengan menekan peluang penyimpangan serta mengakselerasi mekanisme layanan kepada masyarakat.

Implementasi kerangka manajemen strategis dapat menjadi jawaban atas sejumlah persoalan fundamental dalam tatanan birokrasi, termasuk rendahnya akuntabilitas, tumpang tindih kebijakan, serta kurangnya efektivitas fungsi pengawasan. Melalui pendekatan ini, institusi pemerintahan mampu membangun

mekanisme evaluasi yang berkesinambungan dan menjamin bahwa setiap pengambilan keputusan didukung oleh data yang valid serta analisis yang mendalam. Dampak positif lainnya adalah munculnya kultur kerja yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil (*result-oriented governance*) di kalangan aparatur sipil negara. Hal ini secara simultan mengafirmasi bahwa tujuan kajian yaitu untuk mengidentifikasi dan memperkuat peran manajemen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab telah tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Studi ini memperlihatkan koherensi sistematis antara objektif penelitian, pendekatan metodologis, dan output yang dihasilkan. Fokus primer riset tertuju pada fungsi manajemen strategik dalam mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas pada institusi pemerintahan. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, kajian ini mengeksplorasi konstruksi teoretis dan empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk memahami mekanisme implementasi prinsip-prinsip manajemen strategik dalam kerangka *good governance*. Analisis komprehensif mengungkapkan bahwa manajemen strategik yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan monitoring hingga evaluasi berkontribusi terhadap penguatan arsitektur akuntabilitas melalui mekanisme kontrol internal dan eksternal, sekaligus memfasilitasi diseminasi informasi publik sebagai manifestasi transparansi administratif. Temuan riset mengafirmasi bahwa manajemen strategik merupakan instrumen vital dalam mengkonstruksi birokrasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja (*result-oriented*).

Pendekatan strategik memungkinkan institusi pemerintah mengintegrasikan berbagai instrumen analitis seperti SWOT, PESTEL, dan Balanced Scorecard untuk mengukur efektivitas kebijakan secara terukur dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam supervisi kebijakan juga terbukti memperkuat legitimasi institusional dan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*). Dengan demikian, studi ini berhasil mendemonstrasikan bahwa manajemen strategik berfungsi bukan semata sebagai aparatus perencanaan, melainkan juga sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, penelitian ini hanya menelaah karakteristik kajian berbasis literatur yang belum menyajikan bukti empiris mengenai praktik implementasi di tingkat operasional. Riset lanjutan direkomendasikan untuk mengadopsi desain penelitian lapangan dengan metode kuantitatif atau *mixed methods* guna memperoleh data komparatif yang lebih robust terkait efektivitas penerapan manajemen strategik pada berbagai strata pemerintahan. Selain itu, riset mendatang dapat diarahkan pada eksplorasi sinergi antara manajemen strategik dan inovasi teknologi digital, khususnya *e-governance* dan sistem informasi publik, dalam rangka mengakselerasi transparansi, aksesibilitas, serta partisipasi sipil dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2022). Strategic management in public services organizations and its effect on accountability. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(3), 456–472.
- Cifuentes-Faura, J. (2023). The role of accountability and transparency in government during disasters: the case of Ukraine–Russia war. *Public Money & Management*, 45(4), 256–265. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2243131>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2021). Transparency research and strategic directions. *Public Administration Review*, 81(1), 144–156. <https://doi.org/10.1111/puar.13223>
- Dwiyanto, A. (2024). Strategic management and transparency in Indonesian local government institutions. *Public Administration Review*, 84(2), 215–229.
- Fox, J. (2022). Dynamic governance, transparency, and accountability: Strategic approaches. *World Development*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105799>
- Hood. (2006). Paradigma New Public Management (NPM) sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 2(3), 11.
- Irawati, S., Hayat, A., Juniar, A., & Handayani, S. A. (2024). Exploring Accountability and Transparency in Government Agency Management: A Literature Review. *Ilomata International Journal of Management*, 5(3). <https://doi.org/10.61194/ijjm.v5i3.1189>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70, 71.
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2020). Making transparency effective: Strategic considerations. *International Political Science Review*, 41(1), 64–79. <https://doi.org/10.1177/0192512118813935>
- Mappasiara. (2020). Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan. *Journal Continuous Education*, 1(1), 11–23.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Penerbit Andi.
- Meijer, A. (2020). Strategic approaches to open government and transparency. *Government Information Quarterly*, 37(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101481>
- Ohemeng, F. L. K., & Ayee, J. (2023). Strategic management in the public sector: Enhancing accountability in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 89(1), 77–95.
- Pearce, J. A. I. I., & Robinson, R. B. (2023). Manajemen Strategik. *Jurnal Ekonomi*,

Manajemen, Dan Akuntansi, 2(3), 3.

- Piotrowski, S. J. (2021). Open government reform: Strategic implications for transparency, accountability, and participation. *Public Performance & Management Review*, 44(6), 1251–1270.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2022). Strategic planning and transparency reforms in Indonesian ministries. *Governance*, 35(4), 921–939.
- Purwanto, E., & Prabowo, H. Y. (2023). Strategic management practices for transparency and accountability in Indonesia's bureaucracy. *Journal of Public Administration Studies*, 8(1), 11–26.
- Rasyid, E., & Nugroho, R. (2020). Strategic management and accountability practices in local governance. *Journal of Public Administration Studies*, 5(2), 65–78.
- RI, B. (2008). *UU No.30 Tahun 2014*.
- RI, B. (2014). *UU No. 14 Tahun 2008*. 1.
- Sampurno. (2020). Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Continuous Education*, 1(1), 13.
- Saputra, F., & Kurniawan, D. (2020). Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Instansi Pemerintah: Studi Kasus di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–59.
- Sofyani, H. (2021). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 20–25.
- Stahl, & Grigsby. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(1), 24–32.
- Sugiyono, S. (2021). Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.151>
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2019). Open government and strategic management perspectives. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 616–628.
- Zeyn. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fairness terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 75.